



for a living planet®

EDISI : JULI - SEPTEMBER 2010

suara

Tesso Nilo

<http://www.wwf.or.id/tessonilo>

**Video Otomatis Rekam Pembukaan Lahan
di Koridor Penting Harimau Sumatera**

**Upaya WWF
Tingkatkan Nilai Jual
Produk Masyarakat
Berbasis Konservasi**



Dari Redaksi

Salam Lestari,
Senang rasanya dapat kembali menjumpai pembaca sekalian.

Suara Tesso Nilo kali ini menyuguhkan laporan tentang memanasnya konflik harimau-manusia di Riau. Dalam kurun waktu tiga bulan (Agustus-Oktober) terjadi tiga kali konflik harimau dan telah memakan korban jiwa dua orang dan satu ekor harimau mati. Tentu semua kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi namun tentunya harus ada upaya nyata untuk memperbaiki keadaan dalam rangka mencegah terjadinya konflik tersebut. Pihak terkait harus lebih siap dan tanggap dalam menangani konflik manusia-harimau tersebut.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk upaya konservasi harimau Sumatera sudah sangat jelas seperti halnya kesepakatan yang dihasikan dalam pertemuan Pre Tiger Summit Dialog Meeting pada 12-14 Juli lalu di Bali. Tiga belas negara yang mewakili habitat alami harima bersepakat untuk melipatgandakan populasi harimau di alam pada tahun harimau berikutnya yakni 2022. Spesies harimau di dunia saat ini tersisa sekitar 3.200 ekor yang meliputi enam sub-spesies yaitu harimau Sumatera, Bengal, Amur, Indochina, Cina Selatan, dan Malaya. Sub-spesies yang ada di Indonesia, harimau sumatera, dengan populasi sekitar 400 individu, mewakili 12 persen dari total populasi harimau di dunia – kondisi ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara kunci dalam pelestarian harimau di dunia.

Kemajuan yang cukup berarti datang dari upaya konservasi gajah Sumatera yang mana pada 20-23 September telah dilaksanakan Workshop Penyusunan Strategi Konservasi Gajah di Pekanbaru kerjasama BBKSDA Riau dan WWF. Workshop ini dibuka oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Ir. Darori,MM. Beberapa poin untuk upaya konservasi gajah Sumatera di Riau telah dirumuskan dalam workshop ini yang tentunya harus diikuti dengan upaya tindak lanjut.

Komitmen penegakan hukum terhadap perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo semakin nyata. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan telah meminta dukungan kepolisian dan semua pihak untuk penegakan hukum di Tesso Nilo seperti diungkapkannya pada kunjungan kerja di Riau pada akhir September lalu. Menteri Kehutanan yang sempat memantau Taman Nasional Tesso Nilo dari udara sangat prihatin karena masih melihat adanya kebakaran hutan di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menegakkan hukum terhadap pelanggaran di TNTN karena kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi yang seharusnya benar-benar dilindungi.

Suara Tesso Nilo, adalah buletin yang dipublikasikan oleh WWF ID Program Riau. Penanggung Jawab: Suhandri **Editor:** Syamsidar **Redaksi:** Nursamsu, Dani Rahadian, Syamsidar, M. Yudi Agusrin, Afdhal Mahyudin **Alamat Redaksi:** Perkantoran Grand Sudirman B.I., Jl. Dr. Setia Maharaja - Pekanbaru. **Telp/Fax:** (0761) 855006, 35323. **email:** tessonilo@wwf.or.id **website:** www.wwf.or.id/tessonilo **layout&cetak:** ule@cbn.net.id

Pembaca sekalian,

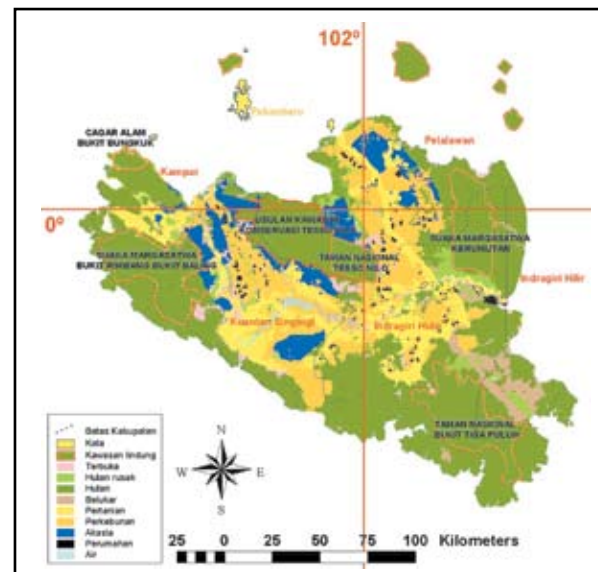
Ada pencapaian yang menggembirakan untuk upaya-upaya konservasi namun di sisi lain ada hal-hal yang harus mendapat perhatian serius semua pihak. Seperti halnya produk madu hutan Tesso Nilo, kini ia telah menembus pasar Malaysia. Kita berharap program pengembangan ekonomi alternatif semakin terbuka lebar sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat terutama yang hidup di pinggir hutan. Dengan demikian masyarakat dapat lebih baik menjaga alam dan mendapat mata pencarian berbasis non kayu.

Selamat membaca.

Wassalam,

Suhandri
Program Manager

	DAFTAR ISI
hal 3.	Konflik Manusia - Harimau Memanas di Riau
hal 6.	Penyusunan Strategi Konservasi Gajah Sumatera di Riau
hal 9.	Pemerintah Berkomitmen Tegas Menegakkan Hukum Terhadap Perambah di Tesso Nilo
hal 11	Upaya WWF Meningkatkan Nilai Jual Produk Masyarakat Berbasis Konservasi
hal 13.	Seekor Harimau Sumatera Mati di Cagar Biosfir Giam Siak Kecil, Bukit Batu
hal 15.	Video Otomatis Rekam Pembukaan Lahan di Koridor Penting Harimau Sumatera
hal 17.	Pelatihan Lingkungan Untuk Petani Kelapa Sawit



TESSO NILO BUKIT TIGAPULUH LANSKAP meliputi 5 kawasan konservasi yang terdiri dari Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Suaka Margasatwa Bukit Rimang-Bukit Baling, Suaka Margasatwa Kerumutan dan Suaka Margasatwa Bukit Bungkok dengan luas 300.000 ha. Taman Nasional Tesso Nilo berada diantara keempat kawasan konservasi yang ada di dalam lanskap tersebut dengan luas 83.068 ha. Ketersambungan di antara kawasan-kawasan konservasi dalam lanskap tersebut diharapkan memberikan keberlangsungan kehidupan satwa dilindungi untuk jangka panjang.

LAPORAN UTAMA



Seekor harimau Sumatera yang masuk dalam perangkap di kawasan penyangga Cagar Biosfir GSK-BB dan hingga akhirnya mati. Foto: Budi AW/WWF-ID

Konflik Manusia-Harimau Memanas di Riau

DUA NYAWA MANUSIA MENJADI KORBAN KONFLIK ANTARA MANUSIA-HARIMAU DI RIAU HANYA DALAM KURUN WAKTU DUA BULAN (AGUSTUS-SEPTEMBER 2010) DI DUA LOKASI YANG BERBEDA.

Sementara itu, seekor harimau mati dalam perangkap. Angka kematian akibat konflik ini cukup tinggi dimana dalam tiga tahun sebelumnya tidak tercatat adanya konflik yang memakan korban jiwa.

Ahmad Raffi (17) tahun ditemukan oleh ayahnya telah meninggal di kebun karet tempat korban dan ibunya bekerja menyadap karet. Kejadian ini terjadi di Desa Sarang Elang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Bengkalis pada 8 Agustus, 2010. Lokasi kejadian berada satu kilometer dari PT. Ruas Utama Jaya (RUJ) yang tengah melakukan aktifitas penebangan di kawasan tersebut. Kawasan ini terletak 8 kilometer dari kawasan yang diusulkan menjadi kawasan konservasi harimau Sumatera Senepis-Buluhala.

Tanda-tanda keberadaan harimau di sekitar telah terpantau oleh masyarakat dua bulan sebelum kejadian penyerangan harimau tersebut, sekitar 5 ekor kambing dilaporkan hilang.

Ketakutan mencekam seluruh desa sehingga banyak aktifitas masyarakat terganggu. Pasca penyerangan harimau tersebut, akhirnya masyarakat secara swadaya memasang dua unit perangkap terbuat dari kayu berbentuk kotak. Sangat dihargai sekali masyarakat dan aparat desa yang melakukan penanganan konflik ini dengan bijak antara lain dengan memasang perangkap dari kayu ini dan tidak mengizinkannya oknum-oknum tertentu memasang jerat sling untuk menangkap harimau tersebut.

Belum hilang dari ingatan, konflik manusia-harimau kembali memakan korban dimana pada 20 September,2010 Sugiono (36) ditemukan meninggal di kebun sawit akibat diterkam harimau. Lokasi kejadian berada di wilayah Desa Tanjung Leban,

Kecamatan Sepahat, Kabupaten Bengkalis yang masuk dalam wilayah konsesi PT. Sakato Pratama Makmur (Sinar Mas Group). Kawasan ini merupakan Zona Penyangga dari Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu.

Peristiwa konflik harimau-manusia yang terjadi di Zona Penyangga Cagar Biosfir tersebut berujung dengan ditangkapnya seekor harimau di kawasan tersebut pada 30 September, 2010. Harimau tersebut rencananya akan dipindahkan ke Blok Hutan Senepis di Kabupaten Bengkalis namun sayang harimau tersebut telah mati dalam perangkap. Penangkapan harimau tersebut disaksikan oleh petugas dari BBKSDA Riau dan YPHS (Yayasan Perlindungan Harimau Sumatera). Penyebab pasti kematian harimau itu sendiri masih menyisakan pertanyaan. Namun dengan tidak adanya penyertaan paramedis di saat penangkapan membuat harimau tersebut tidak mendapat perlakuan medis semestinya pasca penangkapan.

Dari informasi yang dikumpulkan, harimau yang terperangkap hanya dibiarkan di dalam perangkap. Kurang lebih empat jam dalam perangkap, harimau tersebut mati. Sementara itu luka di kaki kanan belakang harimau tersebut dinyatakan telah terjadi lama sebelumnya dan menyebabkan harimau tidak lagi mampu berburu di alam. Tidak ada informasi pasti menyatakan kapan harimau tersebut terjatuh ke dalam perangkap. Namun dari pengamatan tim WWF di lapangan, terlihat bahwa luka di kaki kanan belakang tersebut masih berwarna merah.

Konflik pun seakan tidak berhenti, awal Oktober konflik harimau-manusia terjadi di Dusun Sungai Arang, Desa Pangkalan Kasai-Siberida, Indragiri Hulu. Satu ekor kambing dan satu ekor anak sapi menjadi korban harimau yang sudah tidak memiliki habitat lagi tersebut. Untuk mengatasi konflik ini, petugas dari BBKSDA Riau bersama dengan WWF telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan langkah-langkah yang dapat mencelakai harimau atau pun manusia. Survei menunjukkan bahwa lokasi kejadian yang dikelilingi oleh kelapa sawit dan berbagai aktifitas manusia lainnya tidak memungkinkan harimau tersebut untuk bertahan di lokasi tersebut. Alat perangkap pun kemudian dipasang di lokasi tersebut.

Kemana harimau Sumatera harus bersembunyi?

Riau merupakan kawasan penting bagi harimau Sumatera karena sebagian kawasan hutan tersisa di Riau merupakan daerah prioritas Lanskap Konservasi Harimau dunia diantaranya Blok hutan Bukit Tigapuluh, Blok Hutan Rimbang Baling dan kawasan yang menghubungkan Bukit Tigapuluh dan Rimbang Baling (atau disebut koridor Rimbang Baling-Bukit Tigapuluh), Blok hutan Tesso Nilo, Blok hutan Kerumutan dan Semenanjung Kampar. Namun kawasan-kawasan ini tengah menghadapi ancaman degradasi hebat untuk kepentingan pembangunan atau pun karena aktifitas perambahan.

Kawasan yang menghubungkan Suaka Margasatwa Rimbang Baling dan Taman Nasional Tesso Nilo atau disebut koridor satwa Rimbang Baling-Bukit Tigapuluh terbukti merupakan habitat potensial harimau. Hal ini terlihat dari hasil penelitian WWF-PHKA di kawasan tersebut selama satu tahun (pertengahan 2009-2010) berhasil mendapatkan puluhan foto harimau. Foto-foto tersebut diidentifikasi berasal dari 12 individu harimau. Sebagian kawasan koridor satwa ini merupakan bagian dari hutan lindung Bukit Batabuh yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi.

Di balik potensinya sebagai habitat harimau, koridor satwa ini tengah mengalami ancaman degradasi hebat karena alih fungsi menjadi kebun sawit. Keadaan ini tentu sangat mengancam keberadaan harimau di kawasan tersebut ditambah lagi tingginya aktifitas perburuan harimau dan satwa mangsa di kawasan tersebut. Hasil patroli yang dilakukan oleh WWF dan BBKSDA Riau di kawasan tersebut berhasil menyita 11 jerat harimau dan 14 jerat mangsa lainnya sepanjang bulan Maret 2010.

Sementara itu hutan Senepis selama ini telah lama diusulkan menjadi Kawasan Konservasi Harimau Sumatera oleh para pihak. Diajukan sejak tahun 2002 oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Walikota Dumai dengan status Suaka Margasatwa. Usulan ini kemudian berkembang dan telah mendapat dukungan dari pihak terkait. Pada tahun 2004, Gubernur Riau mendukung penunjukan kawasan konservasi Harimau Sumatera Senepis dan Buluhala seluas 60.000 ha di Kota Dumai lewat Surat Gubernur Riau Nomor: 500/EKBANG/63.18 tanggal 18 Oktober 2004. Pada tahun 2006, Menteri Kehutanan men-

Tabel Konflik dan Perburuan Harimau Sumatera di Riau (2005-2010)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
Harimau mati akibat perburuan	12	10	9	5	2	2	40
Harimau mati akibat konflik	3	2	5	2	1	4	17
Korban jiwa	6	2	0	0	0	2	10
Korban cedera	12	5	0	0	8	0	25



Perangkap harimau yang terbuat dari kayu yang dibuat oleh masyarakat Desa Sarang Elang, Rimba Melintang-Rohil pasca jatuhnya korban akibat konflik manusia- harimau. Foto: Erizal/WWF-ID

geluarkan surat Persetujuan Prinsip Pembentukan Kawasan Konservasi Harimau Senepis-Buluhala di Kota Dumai, Propinsi Riau dengan luas 106.086 ha dengan pola manajemen kolaborasi antara pemegang izin IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dengan pengelolaan kawasan konservasi Harimau.

Penunjukkan kawasan yang akan dijadikan kawasan konservasi harimau tersebut dalam prosesnya mengalami beberapa perubahan luasan hingga akhirnya ditetapkan seluas 106.086 ha yang mana sebagian besarnya yakni seluas 90.956 ha merupakan konsesi Diamond Raya Timber. Pengelolaan kolaboratif yang diusulkan tersebut belum berjalan optimal. Kawasan yang diusulkan sebagai kawasan konservasi harimau tersebut pun tengah mengalami degradasi karena pembukaan dan alih fungsi hutan. Sehingga konflik harimau-manusia di sekitar kawasan tersebut pun seringkali terjadi. Dan yang terbaru adalah konflik yang terjadi di Desa Sarang Elang pada Agustus lalu.

Konflik manusia-harimau di kawasan Senepis dan sekitarnya cukup tinggi dan telah beberapa kali merenggut korban jiwa

ataupun luka ringan dan berat. Menurut catatan konflik tertinggi di sekitar kawasan ini terjadi tahun 2002 dan 2004 dimana tiga orang luka pada tahun 2002 sementara lima orang meninggal dan empat luka pada tahun 2004.

Ancaman utama kepunahan harimau antara lain hilang dan terfragmentasinya habitat yang tidak terkendali, berkurangnya jumlah mangsa alami, perburuan dan perdagangan ilegal, serta konflik dengan masyarakat yang tinggal di sekitar habitat harimau. Dengan kondisi hutan Riau yang rata-rata berkurang 180.000 ha per tahunnya, konflik manusia-harimau akan terus meningkat jika tidak ada upaya restorasi dan perlindungan habitatnya. Terlebih lagi tanda-tanda keberadaan harimau juga terdeteksi di luar kawasan lindung dan konsesi perusahaan. Penerapan praktik-praktik pengelolaan yang lebih baik harus dilakukan oleh pemegang konsesi terhadap daerah jelajah satwa yang berada dalam konsesinya. (Syamsidar)

Penyusunan Strategi Konservasi Gajah Sumatera di Riau

WORKSHOP STRATEGI MANAJEMEN KONSERVASI GAJAH SUMATERA di Provinsi Riau dilaksanakan di Pekanbaru pada 20-23 September 2010. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Ir.Darori,MM. Workshop ini diharapkan dapat merumuskan konsep strategi konservasi Gajah Sumatera di Provinsi Riau untuk disepakati dan diimplementasikan oleh semua stakeholders terutama upaya-upaya mitigasi konflik manusia-gajah. Selain itu workshop ini dimaksud untuk mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman tentang Strategi Konservasi Gajah Nasional 2007–2017 yang akan diaplikasikan pada tingkat propinsi dan Permenhut no. 48 tentang mitigasi konflik satwa liar.

Pada pidato pembukaan workshop tersebut, Dirjen PHKA, Darori yang bertindak sebagai keynote speaker menyatakan, “Dulu waktu menentukan kawasan konservasi kita hanya memperhatikan kalau kawasan itu terjal dikonservasi tapi kita lupa bahwa gajah dan harimau hidup di kawasan datar dimana mereka hidup di kawasan HPH (Hak Penguasaan Hutan). Tapi sekarang hutan produksi kita sudah banyak berubah fungsi, kebun-kebun dibuka tanpa prosedur sehingga mempersempit habitat mereka”. Dalam kesempatan tersebut, Darori meminta agar workshop ini menghasilkan solusi adil baik bagi gajah dan manusia.

Gajah liar yang berada di Sumatera khususnya Riau tengah mengalami proses depopulasi karena kehilangan habitat, konflik, dan penanganan konflik yang tidak tepat. Untuk mengatasi situasi ini harus ada strategi agar populasi gajah liar dapat bertambah serta kerugian akibat konflik manusia dan gajah dapat dikurangi hingga taraf yang dapat diabaikan. Dengan kondisi Riau sekarang ini dimana hanya 10 % dari hutannya yang tersisa yang dapat menjadi habitat gajah, adanya strategi konservasi gajah Sumatera sangatlah penting.

Sementara itu, dari sembilan kantong gajah tersisa di Riau dua diantaranya terdapat di hutan Tesso Nilo baik kawasan taman nasional dan sekitarnya. Taman Nasional Tesso Nilo ditunjuk salah satunya sebagai Pusat Konservasi Gajah di Riau. Namun tingginya perambahan di kawasan tersebut mengancam keberlangsungan gajah-gajah yang mendiami kawasan tersebut dan akan menyebabkan konflik dengan masyarakat.

Kondisi perambahan massif di Tesso Nilo menjadi perhatian sendiri bagi Darori. “TNTN adalah taman nasional yang diper-

untukkan untuk kawasan konservasi tapi diubah menjadi kebun padahal Tesso Nilo adalah kantong terbesar harimau dan gajah Sumatera”. Menyikapi praktik illegal di kawasan konservasi ini, Darori pun menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penegakan hukum. “Pemerintah dalam hal ini Kementerian kehutanan ingin membantu permasalahan hukum di kawasan hutan di seluruh Indonesia” dan untuk ini Kementerian Kehutanan telah memiliki Tim Terpadu Penegakan Hukum. Ia menambahkan bahwa Departemen menunggu laporan pelanggaran tersebut dari daerah dan ia berharap laporan dari Riau segera masuk ke Departemen Kehutanan.

Kondisi Gajah Sumatera di Riau

Gajah Sumatera merupakan spesies yang terancam punah dan dilindungi di Indonesia. Spesies ini terdaftar dalam red list book IUCN (The World Conservation Union) dengan status terancam punah. Menurut CITES (Convention on International Trade of Endangered Fauna and Flora / Konvensi tentang Perdagangan International Satwa dan Tumbuhan) Gajah Asia masuk dalam kelompok Appendix I.

Konflik masyarakat dengan gajah, selain merugikan manusia juga mencelakai gajah. Masyarakat dengan berbagai cara melakukan penanganan gangguan gajah yang kadangkala tidak memenuhi standar sebagaimana seharusnya sehingga tidak jarang berakibat kematian terhadap gajah. Gajah dianggap hama yang harus dilenyapkan karena merugikan, merusak dan memakan korban manusia. Hal lain yang memperparah kondisi ini adalah beban bagi Pemerintah Daerah karena harus mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk mengurangi konflik gajah. Suatu tantangan ke depan yang harus dirubah adalah bagaimana menjadikan Gajah Sumatra sebagai anugerah dari Tuhan di Riau dan bagaimana membangun aspek keuntungan bagi daerah, masyarakat dan stakeholders lebih luas.

Kadishut Riau, Zulkifli Yusuf mewakili Gubernur Riau pada workshop ini juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi populasi dan habitat gajah di Riau. “Tiga kantong gajah di Riau telah hilang yakni kantong Siabu, Kuntu dan Ramba Hilir,” terang Zulkifli. Ia mengharapkan bahwa workshop ini tidak saja ditinjau secara akademis tetapi juga menghasilkan upaya konkrit untuk penanganan konflik manusia-gajah di Riau.

Worskhop tiga hari ini berhasil merumuskan beberapa pedoman strategi konservasi gajah yaitu:

1. Merumuskan sejumlah gagasan penting di 9 kantong gajah tersisa di Riau yang meliputi 6 arahan strategis konservasi gajah.
2. Perlunya melakukan kajian antropologi (pandangan dan relasi masyarakat lampau terhadap gajah) dan ekologi dalam penanganan konflik gajah dan manusia. Hal ini diperlukan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan model penanganan konflik gajah dan manusia.
3. Kolaborasi multipihak yang melibatkan perusahaan secara aktif dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya terutama perusahaan-perusahaan yang konsesinya menjadi habitat dan daerah jelajah gajah.
4. Pengelolaan habitat gajah di wilayah-wilayah konflik dan penekanan pada sinkronisasi dan menyegerakan penyelesaian tata ruang propinsi dan kabupaten yang mengako-



modir kantong-kantong gajah sebagai bagian dalam implementasi tata ruang hijau di Riau.

5. Memprioritaskan penegakan hukum di wilayah-wilayah lahan negara atau kawasan lindung yang diklaim masyarakat dan perusahaan yang menyalahi peruntukan perijinan. Penegakan hukum ini penting untuk mengembalikan kawasan-kawasan lindung satwa seperti gajah ke kondisi semula.
6. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan konservasi gajah.
7. Pembentukan task force untuk strategi konservasi gajah terutama dalam upaya mitigasi konflik gajah di tingkat kabupaten dan provinsi di Riau, sebagai implementasi dari Permenhut no.48 tahun 2008 dan upaya membantu Satuan Tugas Mitigasi Konflik.

Penanggulangan Konflik Manusia - Satwa Liar

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen PHKA, Dr.Ir. Harry Santoso dalam presentasinya menyatakan bahwa penanggulangan konflik manusia-satwa liar harus mengikuti prinsip-prinsip antara lain:

1. Manusia dan satwa liar sama-sama penting
Konflik menempatkan kedua pihak pada tempat yang dirugikan oleh karena itu opsi solusi konflik harus didasari pada mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia & pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik

2. Site specific
Variasi karakteristik habitat, populasi, dll disebabkan intensitas & solusi penanganan konflik bervariasi di tiap wilayah oleh karena itu menuntut penanganan yg berorientasi kpd berbagai faktor yg berperan dalam sebuah konflik. Sangat memungkinkan terjadinya pilihan kombinasi solusi yg beragam pula di masing-masing wilayah konflik.
3. Tidak ada solusi tunggal
Konflik manusia-satwa liar & tindakan penanggulangannya merupakan sesuatu yang kompleks karena menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial yang tergabung dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang komprehensif.
4. Skala lansekap
Satwa liar tertentu, termasuk gajah, mempunyai daerah jelajah yang sangat luas oleh karena itu upaya penanggulangan konflik yang komprehensif harus berdasar penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajahnya (home range based mitigation)
5. Tanggung jawab multipihak
Selain sebagai sebuah isu konservasi, konflik juga mempengaruhi & memiliki dampak sosial ekonomi di daerah. Sehingga penanggulangan konflik manusia-satwa liar harus melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk dunia usaha & para pengguna lahan skala luas untuk berbagi tanggungjawab.

Sementara itu, Bappeda Riau dalam presentasinya mengenai KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP menjabarkan program Pemda Riau dalam melestarikan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui program-program antara lain:

1. Pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara, hutan, lahan, ekosistem pesisir dan laut dengan mengendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 2. Peningkatan kemampuan manajemen peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 3. Rehabilitasi, konservasi, dan perlindungan hutan dan lahan.
 4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- Sementara itu kebijakan penataan ruang Riau berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Riau diarahkan al:
- Menciptakan keserasian dan keseimbangan pemanfaatan ruang diantara berbagai kepentingan untuk mendukung perkembangan antar sektor dan antar kawasan di dalam wilayah, ke arah terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
 - Menata kembali kawasan-kawasan hutan sesuai kondisi, fungsi dan peruntukan ruangnya untuk meningkatkan optimalitas pemanfaatan dan pemeliharaan kelestarian fungsi hutan, termasuk di dalamnya pengembangan hutan rakyat bagi masyarakat sekitar.
 - Melaksanakan redistribusi dan realokasi penguasaan atas lahan sebagai asset ekonomis untuk mewujudkan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat sejalan dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha kecil, menengah dan koperasi (UMKM).

Upaya konservasi gajah Sumatera harus didukung dengan kebijakan tata ruang. Hal ini didasarkan pada adanya kebutuhan mendesak untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan di masa mendatang ke dalam kebijakan, misalnya kebijakan terkait dengan pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati,

mitigasi konflik antara manusia dan satwa, perubahan iklim dan sebagainya. Komitmen untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan di pulau Sumatera telah dituangkan secara detail dalam Tata Ruang Pulau Sumatera sebagaimana diatur dalam UUNo. 26/2008 tentang RTRWN/Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Demikian penjelasan Chairul Saleh, Sekretaris Jendral For TRUST (Forum Tata Ruang Sumatera) dalam presentasinya dalam Peran For TRUST Dalam Mendukung **Pengembangan Tata Ruang Berbasis Ekosistem**.

For TRUST sejauh ini telah berhasil mengembangkan Konsep Tata Ruang Berbasis Ekosistem, memberikan masukan terhadap konsep Tata Ruang Pulau Sumatera, dan turut menyusun Peta Jalan Penyelamatan Ekosistem Sumatera. Capaian yang signifikan dalam konsep penataan ruang ini berawal dari kesepakatan 10 Gubernur se-Sumatera pada September 2008 yang berkomitmen untuk melakukan penyelamatan ekosistem Pulau Sumatera. Kesepakatan tersebut terdiri dari:

1. Penataan Ruang Pulau Sumatera Berbasis Ekosistem
2. Restorasi kawasan kritis untuk perlindungan sistem kehidupan
3. Melindungi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan sistem kehidupan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim

Konflik manusia-gajah di Riau telah banyak memakan korban baik manusia maupun gajah. Bagaimanapun gajah berperan penting dalam satu ekosistem, kepunahan mereka tentu akan berdampak pada terganggunya keutuhan ekosistem tersebut. Kerusakan habitat mereka lah yang telah menyebabkan mereka berkonflik dengan manusia, oleh karena itu manusia harus lebih arif dalam menyikapi keberadaan gajah sebagai suatu anugerah. Penataan ruang berbasis ekosistem merupakan suatu solusi untuk dapat menjamin pembangunan berkelanjutan. **(Syamsidar)**



Perambahan di TNTN. Foto: Srim Mariati/ WWF-ID

Pemerintah Berkomitmen Tegas Menegakkan Hukum Terhadap Perambahan di Tesso Nilo

KOMITMEN PEMERINTAH PUSAT DALAM HAL INI KEMENTERIAN KEHUTANAN untuk melakukan penegakan hukum di Taman Nasional Tesso Nilo semakin jelas. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan ke Riau pada 23 September 2010 lalu. Dalam kunjungan kerjanya ke Riau tersebut, Menteri Kehutanan juga melakukan survei dari udara melihat kondisi Taman Nasional Tesso Nilo setelah melakukan kunjungan ke perusahaan industri kehutanan. Dihadapan hadirin kegiatan Penyerahan Penetapan wilayah KPH Tasik Besar Serkap sebagai KPH Model yang berlangsung di kantor Gubernur Riau, Menteri kehutanan menyampaikan keprihatinannya terhadap apa yang terjadi di Tesso Nilo karena pada saat terbang di atas Tesso Nilo ia masih melihat asap membumbung dari tengah-tengah kawasan konservasi tersebut.

Dalam pidatonya pada kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan menyatakan, "Saya minta dukungan Polda Riau bahwa kita tidak ada bermaksud untuk menekan rakyat tapi Tesso Nilo adalah kawasan konservasi, jadi jika ada orang yang bakar lahan di sana akan kita tangkap." Pernyataan ini menjadi pengumuman publik atas komitmen pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di TNTN pasca perluasan taman nasional tersebut pada Oktober 2009.

Menteri Kehutanan juga berharap bahwa Tesso Nilo dapat dikelola sebagaimana layaknya taman nasional. "Bagaimana Tesso Nilo itu dikelola benar-benar seperti taman nasional kemudian bisa dijadikan kawasan wisata yang dapat menjadi kebanggaan masyarakat Riau," Kata Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. Ia

menambahkan keberhasilan mengembangkan Tesso Nilo akan menjadi promosi bagi dunia untuk dapat menghapus citra Riau sebagai perusak lingkungan.

Penegakkan hukum di Taman Nasional Tesso Nilo ini sejalan dengan dua tugas pokok Kementerian Kehutanan saat ini yakni menanam pohon dan penegakkan hukum. Selain itu, penegakkan hukum ini juga sudah menjadi komitmen bersama pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Departemen kehutanan seperti tertuang dalam kesepakatan bersama Agustus 2008. Dalam Kesepakatan tersebut disepakati bahwa pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten akan melakukan Perluasan dan Penanganan Perambahan, Illegal Logging dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Tesso Nilo.



Peserta Workshop Penyusunan Strategi Konservasi Gajah Sumatera di Riau. Foto Syamsuardi/WWF-ID

TNTN	Jumlah KK Menetap		
	2005	2007	2009
SK 255/Menhut-II/2004	370	720	666
SK 633/Menhut-II/2009	55	669	947
Jumlah	425	1.389	1.613

Keterangan : Tabel ini belum memasukkan 1 kelompok perambah yaang berada di kawasan SK 663/Menhut-II/2009 (atau disebut Kelompok Perambahan Koridor RAPP Ukui-Gondai)

TNTN	Asal Usul KK	
	Lokal (berasal dari sekitar Tesso Nilo)	Pendatang
SK 255/Menhut-II/2004	43	623
SK 633/Menhut-II/2009	17	930
Jumlah	60	1.553

Sebagai langkah awal penegakkan hukum tersebut, Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan Kepolisian Resort Pelalawan pada awal Oktober menyebarkan surat pemberitahuan dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo mengenai status kawasan TNTN dan rencana akan dilakukannya penegakkan hukum dan reboisasi taman nasional tersebut. Surat tersebut juga berisikan peringatan kepada perambah agar menghentikan kegiatannya dan meninggalkan Taman Nasional Tesso Nilo sehubungan akan dilakukannya penegakan hukum di taman nasional tersebut. Sekitar 1000 lembar surat pemberitahuan tersebut telah disebarkan kepada perambah, ketua kelompok perambahan dan kepala dan aparat desa di sekitar TNTN. Melalui surat ini diharapkan perambah menyadari akan keseriusan pemerintah akan penanganan perambahan di kawasan tersebut dan memulihkan kerusakan hutan yang telah terjadi.

Sosialisasi kepada instansi terkait tentang kondisi dan rencana penanganan perambahan di TNTN juga telah diaktifkan untuk membangun dukungan terhadap upaya yang akan dilaksanakan. Pembahasan mengenai penanganan perambahan pun semakin diintensifkan di tingkat pusat (Kementrian Kehutanan). Sehingga diharapkan penanganan dapat dilakukan secara komprehensif dan didukung oleh semua pihak.

Kondisi Perambahan di TNTN dan Upaya Penegakan Hukum

Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 83.068 Ha kini didiami oleh sekitar 1.553 Kepala Keluarga yang tersebar di 14 Kelompok Perambahan.

Untuk perambahan di sekitar koridor RAPP Ukui –Gondai sendiri, berdasarkan survei yang dilakukan tahun 2005 dan 2007 terdapat 134 pendatang yang merambah kawasan tersebut.

Perambahan secara umum dilakukan oleh pendatang hal ini terlihat dari perbandingan jumlah perambah lokal dan perambah pendatang. Kawasan yang dirambah di TNTN yang ditunjuk pada tahun 2004 diperkirakan seluas 9.233 Ha. Sebagian besar kawasan tersebut diperoleh dengan cara membeli yakni sekitar 4.216 Ha. Hal ini menunjukkan faktor yang mendorong percepatan terjadinya perambahan di areal ini adalah adanya praktik jual beli lahan. Keterlibatan oknum pemerintahan desa

dan tokoh adat/masyarakat dalam praktik jual beli lahan akan mempermudah izin penggunaan tanah. Tingginya angka asal usul lahan dari cara membeli berarti kepemilikan lahan di lokasi perambahan merupakan pendatang dari luar Tesso Nilo.

Asal usul lahan yang terbesar kedua adalah digarap sendiri. Asal usul lahan garap sendiri bukan saja karena adanya pengakuan hak adat atau wilayah desa oleh masyarakat tempatan, tetapi perambah yang pada mulanya membeli lahan kemudian dengan swadaya menambah areal perambahannya sendiri.

Sementara itu, perkiraan luas perambahan di kawasan perluasan TNTN berkisar ± 10.819 Ha. Luas ini belum termasuk kelompok perambahan Koridor RAPP Ukui-Gondai karena pada survei tahun 2009 pendataan di kawasan ini belum dilaksanakan. Dari 10.819 Ha kawasan yang telah dirambah tersebut, teridentifikasi sebagian besar diperoleh dengan cara membeli yakni seluas 9.821 Ha. Hal ini menunjukkan faktor yang mendorong percepatan terjadinya perambahan di areal ini adalah adanya praktik jual beli lahan. Keterlibatan oknum pemerintah desa dan tokoh adat/masyarakat dalam praktik jual beli lahan sekaligus mempermudah izin penggunaan tanah. Besarnya luasan areal yang diperoleh dengan cara membeli ini berkorelasi erat dengan pemilik atau pengguna areal perambahan datang dari luar Tesso Nilo.

Asal usul lahan yang terbesar kedua adalah dari sistem bagi hasil yaitu sekitar ± 700 ha dari total perambahan ± 10.819 Ha. Bagi hasil terjadi karena adanya pengakuan hak adat atau wilayah desa oleh masyarakat tempatan.

Praktik penjualan lahan atas suatu kawasan hutan merupakan kegiatan melanggar hukum. Upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh Balai Taman Nasional dan pemangku kepentingan di Tesso Nilo. Antara 2006-2010 telah ada 7 kasus penebangan pohon, kebakaran hutan yang telah jatuh vonis dan menjerat 12 terdakwa. Perlu komitmen yang kuat dan dukungan nyata untuk penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal di Tesso Nilo. Semoga dengan semakin tegasnya upaya pemerintah dalam penanganan perambahan di Tesso Nilo melalui penegakan hukum dapat menjerat pelaku-pelaku utama perambahan di Tesso Nilo. (Syamsidar, Nursamsu).

Upaya WWF Meningkatkan Nilai Jual Produk Masyarakat Berbasis Konservasi

SETELAH SUKSES MEMASARKAN MADU HUTAN

TESSO NILO KE MALAYSIA sebanyak satu ton pada bulan Juni lalu, WWF-Indonesia melalui program Community Empowerment terus mendorong konsumsi produk ramah lingkungan dan mengupayakan nilai keadilan bagi masyarakat. Adapun bentuk kegiatan kali ini adalah meluncurkan kampanye edukasi publik “Green and Fair Products” yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010 bertempat di Balai Sarwono, Jakarta.

Target utama kampanye ini adalah bagaimana mendidik publik untuk memilih produk yang mereka konsumsi. Masyarakat diharapkan mulai memperhatikan dari mana produk yang mereka konsumsi berasal, bagaimana pembuatannya dan siapa yang menjualnya. Kesadaran masyarakat sudah seharusnya juga ditingkatkan untuk dapat berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam, misal masyarakat harus lebih peduli apa implikasi kalau mereka beli produk suatu produk, apakah produk tersebut sudah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat secara lestari atau apakah alam ikut rusak kalau mereka beli produk tersebut?

Green and Fair Products adalah inisiatif WWF-Indonesia sebagai program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemasaran hasilnya secara lestari. Program ini telah dirintis sejak lima tahun lalu dan hingga kini telah cukup berkembang dengan baik. Produk-produk yang termasuk dalam Green and Fair ini adalah produk yang diambil atau dibudidayakan secara berkelanjutan dan dikelola oleh masyarakat. Produk tersebut dipasarkan secara adil dengan penentuan harga yang transparan dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam hal ini kelompok masyarakat binaan.



Sejauh ini telah ada delapan produk unggulan Green and Fair WWF-Indonesia yang berasal dari beberapa kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Produk tersebut mencakup kopi robusta Kuyungarang dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan-Lampung, madu hutan Tesso Nilo dari Taman Nasional Tesso Nilo-Riau, minyak kayu putih Walabi dari Taman Nasional Wasur-Merauke, beras Adan Tana Tam dari dataran tinggi Borneo (beras organik varietas lokal yang merepresentasikan produk lintas batas yang dibudidayakan oleh masyarakat di perbatasan Malaysia dan Indonesia), madu hutan Gunung Mutis- NTT, kerajinan patung badak dari sekitar Taman Nasional Ujung Kulon-Jawa Barat, produk olahan dari Aloe vera dari Taman Nasional Sebangau-kalteng, dan kerajinan Manik Banuaka dari Taman Nasional Betung Kerihun di Kalimantan Barat.

Kampanye Green and Fair Product ini direncanakan berlangsung hingga Desember 2010 dan akan dilaksanakan roadshow ke beberapa site WWF-ID termasuk Riau. Dalam peluncuran kampanye ini, Asosiasi Petani Madu Hutan Tesso Nilo (APMTN) mewakili Riau untuk mengikuti kegiatan tersebut dan memamerkan madu hutan Tesso Nilo, sebagai salah satu produk Green and Fair. Pada kesempatan ini, Ahmad Wazar, Ketua APMTN mengatakan; “Saya sangat mengharapkan WWF bisa terus membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dengan memfasilitasi produk-produk masyarakat seperti madu Tesso Nilo. Dia menambahkan bahwa kegiatan kampanye ini sangat



bermanfaat untuk kemajuan organisasi yang ia pimpin karena memungkinkan terbukanya peluang pasar yang lebih luas dengan dipamerkannya produk-produk masyarakat.

Direktur Eksekutif WWF-Indonesia, Efransjah mengatakan, "Pengelolaan sumber daya alam dan pemasaran hasilnya secara lestari merupakan bagian penting upaya konservasi keanekaragaman hayati dan membantu tercapainya kehidupan yang baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi. "Inisiatif Green and Fair Products merupakan suatu upaya menuju sinergi dimensi ekologi dan sosial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," imbuhnya.

Dalam kesempatan pameran ini, sebanyak 200 botol madu hutan Tesso Nilo berhasil terjual. Diharapkan rangkaian kampanye Green and Fair ini akan semakin membuka pengetahuan masyarakat tentang madu Tesso Nilo dan juga pasar madu tersebut.

Ekspor Kedua Madu Tesso Nilo ke Malaysia

Sebagai tindak lanjut dari komitmen dan kerjasama dengan produser makanan dari Malaysia, TLH Product Industries SDN BHD, untuk kedua kalinya satu ton madu hutan Tesso Nilo berhasil diekspor pada awal Oktober ini. Ekspor yang kedua ini membuktikan kepercayaan TLH terhadap mutu dan higienitas madu Tesso Nilo.

Tentang *Green and Fair Products*

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi adalah masyarakat yang tersentuh langsung atau merasakan secara langsung dampak pengelolaan kawasan konservasi dan zona penyangganya. Banyak tumbuhan yang potensial yang berada di sekitar hutan dapat dijadikan komoditas atau barang untuk diperjualbelikan, dibudidayakan atau menjadi bahan obat, atau mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Yayasan WWF-Indonesia bekerjasama dengan kelompok dampingannya di beberapa desa di seluruh tanah air membantu mempromosikan dan memasarkan produk yang terbuat dari bahan alami tersebut. WWF percaya bahwa produk ini adalah produk "terjamin" yang berarti produk tersebut memenuhi beberapa kriteria mendasar dari segi ekologi dan sosial. Produk tersebut berasal dari daerah konservasi yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat, diambil atau dibudidayakan secara berkelanjutan, diolah oleh usaha-usaha kecil milik masyarakat. Produk tersebut dijual dengan harga pasar yang adil dengan sistem penentuan harga yang transparan.

Mengapa disebut "Hijau" (green)?

- Produk "hijau" karena berasal dari kawasan hutan, laut, dan ladang/kebun kawasan konservasi yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat atau di sekitar kawasan konservasi
- Produk "hijau" karena terbuat dari bahan alami yang di panen secara berkelanjutan.
- Produk "hijau" karena produk pertanian yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat tanpa penggunaan pestisida maupun penyubur tanah dari bahan kimia.

Mengapa disebut "fair" (berkeadilan)?

- Produk "berkeadilan" karena hasil penjualannya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan upaya mereka untuk mengelola lahan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Jika sebelumnya disepakati pengiriman madu hutan Tesso Nilo ke Malaysia dilakukan per tiga bulanan, untuk pengiriman selanjutnya disepakati pengiriman akan dilakukan setiap bulannya. Dengan demikian pengiriman dapat dilakukan secara reguler sehingga perputaran madu di tingkat masyarakat dapat lebih terjaga.

Untuk dapat bertahan dan menghasilkan madu yang lestari, hutan sekitar pohon Sialang harus tetap terjaga. Masyarakat sendiri telah lama memiliki kearifan lokal untuk menjaga hutan kepungan pohon Sialang tersebut namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian hutan kepungan tersebut telah mengalami degradasi. Hal ini telah menyebabkan beberapa pohon Sialang tumbang, mengering, atau tidak disarangi lagi oleh lebah madu. Untuk mengikat perlindungan terhadap hutan kepungan pohon Sialang tersebut, WWF memfasilitasi beberapa desa di sekitar Tesso Nilo khususnya desa yang masuk dalam Asosiasi Petani Madu Tesso Nilo (diantaranya Desa Lubuk Kembang Bunga, Air Hitam, Pangkalan Gondai) untuk membuat peraturan desa mengenai perlindungan Sialang. Salah satu isi peraturan desa tersebut menyatakan bahwa pohon Sialang tidak boleh ditebang. Peraturan Desa ini juga akan dituangkan dalam Peraturan Bupati khususnya Kabupaten Pelalawan dimana Taman Nasional Tesso Nilo berada. **(Adi Purwoko, Syamsidar)**



Proses evakuasi bangkai harimau mati dari kawasan penyangga Cagar Biosfir GSK-BB. Foto: Budi Awaluddin/ WWF-ID

Seekor Harimau Sumatera Mati di Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu

SEKOR HARIMAU SUMATERA DEWASA MATI SETELAH MASUK DALAM PERANGKAP yang dipasang masyarakat pada 30 September, 2010 di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Sepahat, Kabupaten Bengkalis. Lokasi tersebut tepatnya berada dalam zona penyangga Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu. Harimau dengan panjang sekitar 1,5 meter tersebut akhirnya mati setelah beberapa jam berada dalam perangkap yang dibuat masyarakat dibawah pengawasan BBKSDA- Riau (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) dan YPHS (Yayasan Pelestarian Harimau Sumatera).

Konflik manusia-harimau di kawasan ini telah merenggut jiwa Sugiono (36 tahun), seorang warga Desa Tanjung Leban pada 20 September, 2010. Pada saat kejadian, korban tengah bekerja di kebun sawit. Warga yang resah karena korban tidak kembali ke rumah hingga malam kemudian melakukan pencarian terhadap korban. Warga akhirnya menemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka-luka yang sangat serius karena terkaman harimau.



nyangga sudah seharusnya dikelola dengan lestari untuk mendukung ekosistem cagar biosfir tersebut terutama zona inti yang dialokasikan sebagai kawasan konservasi.

Cagar Biosfer dibagi menjadi 3 zona pengelolaan yang saling berhubungan, yaitu :

- Area inti (Core Area) adalah kawasan konservasi atau kawasan lindung dengan luas yang memadai, mempunyai perlindungan hukum jangka panjang, untuk melestarikan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.
- Zona penyangga (Buffer Zone) adalah wilayah yang men

Alih fungsi lahan telah menyebabkan menyempitnya habitat alami satwa dilindungi tersebut apalagi kawasan tersebut merupakan kawasan penyangga cagar biosfir tersebut. Kawasan pe-

gelilingi atau berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Dimana hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat dilakukan.

- Area transisi (Transition Zone) adalah wilayah terluar dan terluas yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona penyangga. Kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan model-model pembangunan berkelanjutan dipromosikan dan dikembangkan.

Setelah jatuhnya korban jiwa di kawasan tersebut, masyarakat diliputi rasa ketakutan yang mendalam karena harimau masih berkeliaran di sekitar pemukiman. Sementara itu, belum terlihat adanya langkah nyata yang dilakukan pemegang otoritas untuk menangani konflik tersebut. Beberapa kali setelah kejadian tersebut, harimau dilaporkan beberapa kali memakan ternak masyarakat. Pada 30 September 2010, akhirnya seekor harimau masuk dalam perangkap yang telah terpasang tiga hari di lokasi kejadian.

Menurut informasi yang dikumpulkan, harimau masuk dalam perangkap sekitar pukul 7 malam dan bertahan beberapa jam di dalam perangkap tersebut hingga akhirnya diperkirakan mati sekitar pukul 11 malam. Menurut pengamatan tim WWF yang turun ke lokasi kejadian terlihat kaki kanan belakang harimau tersebut mengalami luka serius karena hanya menyisakan tulang jari kaki. Sementara itu, beberapa pernyataan pihak terkait di media dinyatakan bahwa luka di kaki harimau tersebut akibat terkena jerat sling beberapa waktu sebelumnya. Namun dari keadaan fisik yang terlihat luka tersebut masih merah yang diduga merupakan luka baru.

Rencananya harimau yang ditangkap ini akan dipindahkan ke blok hutan Senepis. Tidak ada penanganan medis yang dilakukan segera pasca penangkapan harimau tersebut. Dan akhirnya rencana tersebut gagal karena harimau telah mati. Sementara

itu, blok hutan Senepis bukanlah merupakan kawasan yang aman bagi harimau saat ini karena kawasan tersebut juga dalam keterancaman alih fungsi lahan. Intensitas konflik manusia-harimau di kawasan tersebut sangat tinggi. Konflik terakhir terjadi pada 8 Agustus 2010 dimana seorang remaja warga Desa Sarang Elang Kecamatan Jumrah Kabupaten Bengkalis meninggal dunia setelah diterkam harimau. Lokasi kejadian hanya berada dalam radius 8 kilometer dari kawasan yang diusulkan menjadi kawasan konservasi harimau Senepis-Buluhala. Aktivitas pembukaan lahan di sekitar kawasan tersebut telah menyebabkan harimau mencari mangsa ke pemukiman.

Cagar biosfir sudah seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada Man and Biosphere (manusia dan ekosistemnya). Cagar Biosfer adalah situs yang ditunjuk oleh berbagai negara melalui kerjasama program MAB-UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan pada upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal. Sebagai kawasan yang menggambarkan keselarasan hubungan antara pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan, melalui kemitraan antara manusia dan alam, cagar biosfer adalah kawasan yang ideal untuk menguji dan mendemonstrasikan pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional. Usulan penetapan cagar biosfer diajukan oleh pemerintah nasional. Setiap calon cagar harus memenuhi kriteria tertentu dan sesuai dengan persyaratan minimum sebelum dimasukkan kedalam jaringan dunia (sumber: internet)

Dengan ditetapkannya Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu tersebut, pengelolaan kawasan tersebut harus lebih baik sehingga sesuai dengan tujuan penetapan kawasan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang mengancam keutuhan ekologi kawasan tersebut harusnya dapat diselesaikan. (Syamsidar)



Seekor harimau mati di kawasan penyangga Cagar Biosfir GSK-BB.
Foto: Budi Awaluddin/ WWF-ID



Satu unit bulldozer yang terekam oleh video trap tengah membuka jalan di kawasan Bukit Batabuh, daerah yang merupakan habitat potensial harimau.

Video Otomatis Rekam Pembukaan Lahan di Koridor Penting Harimau Sumatera

JAKARTA — KAMERA VIDEO OTOMATIS (CAMERA TRAPPING) YANG DIPASANG WWF dan mitra di Bukit Batabuh – sebuah kawasan penting perlintasan harimau Sumatera yang menghubungkan antara lansekap Bukit Tigapuluh dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling-- Propinsi Riau berhasil merekam bukti adanya ancaman serius bagi keberadaan satwa dilindungi ini. Dalam rekaman video dan foto yang didokumentasikan antara bulan Mei sampai dengan Juni 2010 diantaranya tampak seekor harimau jantan berjalan mendekati kamera dan mengendusnya. Seminggu kemudian, di lokasi yang sama, kamera otomatis bersensor panas itu mendokumentasikan sebuah alat berat bulldozer sedang membuka jalan untuk pengembangan kebun sawit. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kamera yang sama kembali merekam gambar seekor harimau melintasi kawasan hutan yang telah gundul yang sebelumnya dilewati oleh bulldozer.

Kawasan Bukit Batabuh dikategorikan sebagai Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau tahun 1994 dan dikategorikan sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1986 –dan kawasan HPT tersebut belum dikenakan hak/ izin pengelolaan oleh perusahaan manapun.

Terlepas dari status lahan yang mengacu pada RTRWP 1994 atau TGHK 1986 kawasan tersebut tidak dapat dibuka untuk perkebunan sawit, sehingga kegiatan pembukaan lahan, termasuk pembukaan jalan dengan bulldozer di kawasan tersebut memiliki indikasi kuat merupakan kegiatan ilegal,” kata Ian Kosasih, Direktur Program Hutan dan Spesies WWF-Indonesia. “Investigasi dan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan kegiatan ilegal harus segera dilakukan

oleh para pihak terkait. Selain itu, untuk memutus mata rantai kegiatan ilegal tersebut, semestinya perusahaan pengolah minyak sawit juga tidak membeli dari petani atau perusahaan yang mengembangkan perkebunan sawitnya secara ilegal.”

Sejak pertengahan 2009 WWF memasang kamera video jebak di kawasan Bukit Batabuh untuk mempelajari distribusi, perilaku, dan ancaman yang dihadapi oleh Harimau Sumatera di koridor satwa antara dua habitat penting Suaka Margasatwa Rimbang Baling dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

“Rekaman video jejak tersebut merupakan bukti ilmiah bahwa Hutan Lindung Bukit Batabuh merupakan habitat penting harimau Sumatera di Riau dan merupakan koridor satwa diantara Lansekap Prioritas Harimau Bukit Tigapuluh dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, sehingga kawasan lindung ini, men-



Jejak harimau di perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan aktifitas manusia, sangat memicu terjadinya konflik.
Foto: Erizal/ WWF-ID

jadi prioritas untuk dilindungi,” kata Ir. M. Awriya Ibrahim, M,Sc Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan. Ia melanjutkan “Pembukaan hutan yang berlangsung di kawasan ini sangat mengancam keberlangsungan hidup satwa langka tersebut karena berpotensi mengurangi habitat alami serta memicu konflik antara manusia dan harimau yang sangat merugikan kedua belah pihak. Kami mengajak semua pihak terkait baik pemerintah daerah propinsi/kabupaten, perusahaan swasta, maupun masyarakat untuk mendukung upaya perlindungan kawasan ini. Kementerian Kehutanan akan mengambil tindakan tegas, jika kegiatan di kawasan tersebut terbukti melanggar hukum.”

Lokasi dimana harimau dan buldozer terekam video Mei 2010 lalu hanya berjarak sekitar 200 meter dari video yang dipasang pada Oktober 2009 di lokasi tempat induk dan dua anak harimau yang sebelumnya terekam kamera.

Perlindungan terhadap habitat kritis harimau merupakan komitmen Indonesia dalam Rencana Aksi dan Strategi Konservasi Harimau Sumatera 2007 dan Rencana Pemulihan Harimau Indonesia (National Tiger Recovery Plan Indonesia) yang disampaikan dalam Pre-Tiger Summit Partners Dialogue

Meeting di Bali Juli lalu. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 13 negara yang merupakan sebaran harimau tersebut, dibahas mengenai rencana bersama untuk mendua-kali-lipatkan populasi harimau dunia di alam pada tahun 2022. Keputusan final dari rencana tersebut akan disepakati dalam pertemuan tingkat kepala negara Global Tiger Summit di Russia 21-24 November mendatang.

“Komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayatinya, termasuk melalui pengembangan tata ruang berbasis ekosistem yang disampaikan dalam forum-forum internasional, seperti Pre Tiger Summit Partners Dialogue Meeting bulan Juli lalu dan Konferensi Keanekaragaman Hayati COP CBD di Nagoya 18-28 Oktober ini, dalam implementasinya harus mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait baik di tingkat propinsi/kabupaten termasuk dalam menyelesaikan permasalahan tata ruang yang masih tumpang tindih,” kata Chairul Salah, Sekjen Forum Tata Ruang Pulau Sumatera (ForTRUST).

Menurutnya, ketersediaan habitat yang memadai disertai dengan perlindungan populasi secara optimal, memungkinkan harimau Sumatera untuk berkembang biak secara alami dengan ketersediaan sumber pakan yang juga memadai, sehingga resiko persinggungan ruang atau konflik dengan manusia pun dapat dihindari. “Dalam konteks ini revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau yang mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem, termasuk mengakomodasi ruang bagi harimau Sumatera menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.”

Kegiatan pembukaan lahan untuk kebun sawit di kawasan tersebut terus berlangsung sehingga dikhawatirkan menimbulkan konflik manusia-harimau. Hal ini diperkuat dengan pengakuan para pekerja sawit di kawasan tersebut yang sering menemukan jejak harimau di sekitar areal kerja mereka.

Tingginya laju pembukaan lahan di Riau mendorong WWF mempercepat proses penghitungan populasi harimau Sumatera di provinsi ini. Selain pembukaan lahan, populasi harimau di Bukit Betabuh juga terancam oleh perburuan liar.

Saat ini populasi harimau sumatera di Indonesia diperkirakan hanya sekitar 400 individu, yaitu sekitar 12 persen dari total populasi harimau di dunia. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara kunci dalam pelestarian harimau di dunia. Ancaman utama kepunahan harimau dunia mencakup hilang dan terfragmentasinya habitat yang tidak terkendali, berkurangnya jumlah mangsa alami, perburuan dan perdagangan ilegal, serta konflik dengan masyarakat yang tinggal di sekitar habitat harimau.



Pelatihan Lingkungan Untuk Petani Kelapa Sawit

PETANI KELAPA SAWIT BERJUMLAH HAMPIR SETENGAH DARI JUMLAH TOTAL perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ada dua tipe petani kelapa sawit, petani plasma dan swadaya. Bertambahnya jumlah petani kelapa sawit dapat berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Sebagai contohnya, sekitar 30 % (28.000 hektar) dari total 83.000 hektar di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah mengalami perambahan, di Propinsi Riau. Ini merupakan salah satu dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau. Beberapa pekebun kelapa sawit yang melakukan okupasi juga terjadi di beberapa kawasan hutan dan kawasan lindung di Provinsi Riau yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Untuk mengurangi degradasi lingkungan yang salah satunya diakibatkan oleh ekspansi Pekebun Kelapa Sawit. WWF Indonesia sudah membuat beberapa Praktek pengelolaan yang baik terhadap satwa yang dilindungi seperti gajah dan harimau Sumatera serta Orangutan. Panduan tersebut dibuat untuk mengatasi konflik manusia dan satwa yang terjadi disekitar perkebunan masyarakat. WWF Indonesia juga membantu Indonesia Smallholder Working Group untuk membuat cek list sederhana penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi. Cek list tersebut dimaksudkan untuk petani kelapa sawit supaya mereka dapat mengidentifikasi kawasan yang bernilai konservasi tinggi yang mungkin terdapat didalam atau disekitar perkebunan masyarakat.

Panduan pengelolaan yang baik untuk satwa dilindungi dibuat sebagai alat untuk pekebun, termasuk petani, untuk mengurangi konflik dengan satwa. Cek list yang disederhanakan juga di perkenalkan kepada petani. Ini dibuat agar petani dapat menghindari pembukaan kawasan yang bernilai konservasi tinggi.

Panduan dan alat-alat tersebut harus disampaikan kepada petani, dengan demikian Indonesia Smallholder Working Group yang beranggotakan Kementerian Pertanian RI, RSPO liaison office, WWF Indonesia, Sawit Watch, Pekebun Besar serta Petani dan Badan sertifikasi, menyelenggarakan pelatihan fasilitator daerah yang telah dilakukan dua gelombang, yaitu Gelombang





pertama yang diselenggarakan di Februari 2009 di Balai Pelatihan Pertanian Ciawi Bogor serta gelombang kedua pada Maret 2010 yang dilaksanakan di Wisma Pertanian Jakarta. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mentransformasikan pengetahuan praktek yang baik terhadap satwa yang dilindungi dan cek list kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) yang disederhanakan dan diharapkan para fasilitator daerah ini dapat mendesain modul pelatihan dan silabus praktek yang baik terhadap satwa yang dilindungi dan kawasan bernilai konservasi tinggi. Modul tersebut di desain dengan bahasa petani, sehingga, kita berharap petani kelapa sawit dapat dengan mudah menyerap pengetahuan tersebut.

Sebanyak 40 fasilitator daerah telah di latih Prinsip & Kriteria RSPO untuk petani, para fasilitator tersebut berasal dari berbagai Propinsi di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Didalam pelatihan untuk fasilitator daerah ini di sampaikan materi mengenai prinsip & kriteria RSPO termasuk juga aspek lingkungan. Didalam pelaksanaan pelatihan ini, Indonesia Smallholder Working Group memandu fasilitator ini membuat modul pelatihan untuk petani. Untuk memudahkan kegiatan pelatihan Prinsip & Kriteria RSPO, termasuk aspek-aspek lingkungan dan sosial kepada petani kelapa sawit.

Setelah Fasilitator Daerah ini mendapat pelatihan mengenai Prinsip & Kriteria RSPO untuk petani, maka di identifikasi beberapa petani plasma yang tersebar di beberapa Propinsi di Sumatera. Untuk dilaksanakan pelatihan yang di pandu oleh fasilitator daerah yang sudah mendapatkan pelatihan sesuai dengan modul dan silabus yang telah disusun oleh para Fasilitator Daerah ini bersama dengan Indonesia Smallholder Working Group..

Beberapa pelatihan singkat untuk petani kelapa sawit di dilaksanakan disepertaran Pulau Sumatera seperti di Siak, Buatan, Ukui dan Sorek Propinsi Riau serta di beberapa propinsi seperti Sumatera Selatan, Jambi. Pelatihan ini dilakukan oleh WWF baik bersama Indonesia Smallholder Working Group dan partner kerja lainnya, seperti LSM daerah. Melalui pelatihan ini, diharapkan petani kelapa sawit dapat melakukan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi dan dapat mengelolanya. Termasuk juga bagaimana mengatasi konflik satwa yang terjadi di perkebunan. Fasilitator daerah telah membantu sekali dida-

lam memberikan pengetahuan kepada petani kelapa sawit. Diharapkan bahwa petani tersebut dapat melaksanakan panduan tersebut pada saat mereka mencoba untuk mengikuti praktek pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Sebanyak lebih dari 500 orang petani kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, baik plasma maupun swadaya sudah mendapatkan pelatihan Prinsip & Kriteria RSPO serta aspek lingkungan ini, beberapa dari kelompok tani kelapa sawit ini sudah merencanakan untuk mengikuti sertifikasi RSPO untuk petani. Diharapkan petani kelapa sawit yang mengikuti sertifikasi RSPO ini dapat menerapkan azas pelestarian lingkungan sehingga mereka dapat berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Aspek Pada aspek lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk petani WWF memberikan beberapa panduan pengelolaan konflik dengan satwa liar dan penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi. Sehingga pekebun didalam mengelola kelapa sawit nya dapat membantu untuk penyelamatan satwa dilindungi dan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Juga diharapkan dari pelatihan ini petani kelapa sawit dapat memenuhi prinsip pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan yang juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pelatihan ini juga mendapatkan dukungan dari Dinas Perkebunan setempat serta Kementrian Pertanian RI yang secara bersama-sama mengawasi jalannya pelatihan tersebut.

Diperlukan lebih banyak pelatih petani untuk prinsip pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan mengingat jumlah petani di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Sekitar lebih dari 3 juta petani Indonesia diharapkan dapat menerapkan prinsip dan kriteria pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan, sehingga kualitas lingkungan dan sosial yang ada disekitar perkebunan kelapa sawit dapat senantiasa terjaga mutunya.

Pada pertemuan Round Table 8 RSPO di Jakarta tanggal 8 – 11 November telah dianugerahkan Sertifikat RSPO untuk Petani Plasma kepada petani Plasma PT. Hindoli Propinsi Sumatera Selatan dan petani Plasma PT. Agrowiratama Sumatera Barat. Dengan dianugerahkan-nya sertifikat RSPO untuk petani ini diharapkan agar menarik minat kelompok petani lainnya, baik plasma maupun swadaya didalam menerapkan praktek-praktek ramah lingkungan serta ramah sosial dan pekebun kelapa sawit dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosialnya pada praktek pembangunan kebunnya. **(Dani Rahadian)**

HCVF (*High Conservation Value Forest*)

HCVF atau hutan bernilai konservasi tinggi untuk pertama kali dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada tahun 1999. Konsep ini menggeser perdebatan kehutanan dari sekedar membicarakan pengertian jenis-jenis hutan tertentu (misal hutan primer, hutan tua) atau metode pemanenan hutan (misal penebangan oleh industri) ke penekanan pada berbagai nilai yang membuat suatu kawasan hutan menjadi penting. Dengan mengidentifikasi nilai-nilai kunci ini dan menjamin bahwa nilai-nilai tersebut dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, sangat dimungkinkan untuk membuat keputusan pengelolaan yang rasional yang konsisten dengan pemeliharaan nilai-nilai lingkungan dan sosial yang penting.

Pembukaan suatu kawasan untuk perkebunan (sawit) seharusnya memperhatikan nilai-nilai konservasi yang dimiliki oleh kawasan tersebut dalam rangka mewujudkan perkebunan yang lestari. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah berbagai kerugian yang timbul baik ekonomi dan ekologi misalnya konflik manusia-satwa liar. Begitu suatu kawasan yang merupakan daerah jelajah satwa liar terutama gajah dirubah fungsi menjadi perkebunan sawit, konflik manusia-gajah sudah pasti terjadi karena pucuk-pucuk sawit atau sawit muda merupakan makanan gajah. Hal seperti ini yang sering terjadi di berbagai tempat di Riau seiring dengan trend pengembangan perkebunan sawit baik dilakukan oleh sektor swasta atau pun perorangan.

Kunci menuju konsep HCVFs adalah nilai konservasi tinggi (HCVs) yang ditemukan di satu kawasan hutan

HCV 1: Kawasan hutan yang mempunyai konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan lokal misal spesies endemik, spesies hampir punah, tempat menyelamatkan diri/ refugia.

HCV 2 : Kawasan hutan yang mempunyai tingkat lanskap yang luas yang penting secara global, regional dan lokal yang berada di dalam atau mempunyai unit pengelolaan. Sebagian besar populasi spesies, atau seluruh spesies yang secara alami ada di kawasan tersebut berada dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan alami.

HCV 3: Kawasan hutan yang berada di dalam atau mempunyai ekosistem yang langka, terancam, atau hampir punah.

HCV 4: Kawasan hutan yang berfungsi sebagai pengatur alam dalam situasi yang kritis (misalnya perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi)

HCV 5: Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misal pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan)

HCV 6 : Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasan-kawasan budaya, ekologi, ekonomi, religi yang penting yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal yang bersangkutan.





Harimau Cacat (foto didapat dengan Camera Trap)

Akibat perburuan liar, harimau ini harus kehilangan salah satu kakinya akibat terkena jebakan manusia. Harimau cacat ini tidak akan bertahan hidup lama di alam sebab kemampuan berburunya sudah tidak sempurna.

Jebakan untuk menjerat harimau sering di temukan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.



WWF for a living planet®

suara
Tesso Nilo